



Fenomena Politik Dinasti Sebagai Tantangan Bagi Sistem Demokrasi di Indonesia dalam Perspektif Mahasiswa Universitas Nias

Nodiveman Waruwu¹, Anugerah Tatema Harefa², Syukur Kasieli Hulu³, Adrianus Bawamenewi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Nias, Indonesia

E-mail: nodivemanwaruwu@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-08-07 Revised: 2024-09-22 Published: 2024-10-03 Keywords: <i>Politics;</i> <i>Dynasty;</i> <i>Democracy.</i>	This research intends to investigate how political dynasties affect the dynamics of democracy in Indonesia from a student perspective. Data was collected through observations and interviews with students who are part of the academic community. The findings show that dynastic politics often hampers political diversity and lowers public trust in the democratic system. This research provides insight into the challenges facing the democratic system in Indonesia and suggests steps that can be taken to strengthen democratic practices in the face of dynastic politics. Based on the results of the research and discussion, the researcher can conclude: first, dynastic politics in the perspective of students is politics on behalf of the family system or the interests of leaders towards subordinates and the utilization of the power of the position held by the leader against these subordinates because there are interests both from family or work interests and so on, which are in one camp which incidentally is that they are one view and when they use dynastic politics they take advantage of this power to influence someone. Second, dynastic politics is not in accordance with the nature of democracy in the perspective of Nias University students because dynastic politics tends to only prioritize family interests or the interests of relatives without considering the needs or justice of society as a whole.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-08-07 Direvisi: 2024-09-22 Dipublikasi: 2024-10-03 Kata kunci: <i>Politik;</i> <i>Dinasti;</i> <i>Demokrasi.</i>	Penelitian ini bermaksud untuk menyelidiki bagaimana politik dinasti mempengaruhi dinamika demokrasi di Indonesia dalam perspektif Mahasiswa. Data di kumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan mahasiswa yang menjadi bagian dari komunitas akademik. Temuan menunjukkan bahwa politik dinasti sering kali menghambat keberagaman politik dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Penelitian ini memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi sistem demokrasi di Indonesia dan menyarankan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat praktik demokrasi dalam menghadapi politik dinasti. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti dapat menyimpulkan: <i>pertama</i> , Politik dinasti dalam perspektif mahasiswa merupakan politik yang mengatasnamakan sistem kekeluargaan atau kepentingan pemimpin terhadap bawahan dan pemanfaatan kekuasaan jabatan yang di pegang oleh pemimpin terhadap bawahan tersebut karena ada kepentingan baik itu dari kekeluargaan atau kepentingan pekerjaan dan sebagainya, yang dalam satu kubu yang notabennya adalah mereka satu view dan ketika mereka menggunakan politik dinasti itu mereka memanfaatkan kekuasaan tersebut untuk mempengaruhi seseorang. <i>Kedua</i> politik dinasti tidak sesuai dengan alam demokrasi dalam perspektif mahasiswa Universitas Nias karna politik dinasti ini cenderung hanya memrioritaskan kepentingan-kepentingan keluarga atau kepentingan kerabat tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau keadilan masyarakat secara keseluruhan.

I. PENDAHULUAN

Dalam upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, atau kekuasaan warga negara, atas negara, demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara. Prinsip trias politica, yang merupakan salah satu pilar demokrasi, membagi kekuasaan politik Negara (eksekutif, yudikatif, dan eksekutif), ke dalam tiga jenis lembaga negara yang sejajar satu sama lain dan tidak saling lepas (independen).

Untuk memastikan bahwa ketiga lembaga Negara ini sejalan dan independen, mereka dapat saling mengawasi dan mengontrol satu sama lain, Suparyanto (2018:1). Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik tempat individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat, Schmeter (2018:3).

Sistem demokrasi prosedural berarti perlunya proses pemilihan terbuka, pembentukan pendapat, dan kemauan, serta partisipasi masyarakat yang luas dalam pemilihan dan pemilihan. Dalam situasi seperti ini, proses politik yang tepat dan efektif diperlukan. Jika semua warga negara dewasa memiliki hak untuk memilih, jika para pengambil keputusan (presiden, perdana menteri, dan badan legislatif) dipilih melalui pemilu yang adil dan jujur, jika para kandidat dapat bersaing dan memperoleh suara mereka, dan jika semua kandidat memiliki kesempatan untuk memberikan suara mereka., sistem politik dianggap demokratis, Parera (2023:1).

Rakyat diberi hak politik untuk berpartisipasi dan bertindak secara bebas dalam sistem yang digunakan untuk memilih pembuat kebijakan dan membuat keputusan otoritatif yang berkaitan dengan kepentingan nasional, regional, atau lokal. Hak seluruh orang dewasa untuk memilih dan berkompetisi untuk posisi politik dilindungi oleh sistem di negara-negara yang dikategorikan sebagai "bebas". Selain itu, para wakil terpilih memiliki kemampuan untuk memberikan suara yang signifikan terhadap kebijakan pemerintah. Kebebasan sipil ini mencakup kebebasan untuk mengembangkan otonomi pribadi, organisasi, dan pikiran. (Freedom House: metodologi survei). Selain itu, demokrasi berfungsi sebagai sistem politik untuk melakukan keputusan publik demi kepentingan umum. Kepentingan umum adalah tujuan utama negara demokrasi, Singh (2021:12).

Salah satu negara yang memiliki pemerintahan demokratis adalah Indonesia. Ada kemungkinan bahwa munculnya demokrasi di Indonesia seiring dengan pembentukan negara Indonesia sebelum dan setelah kemerdekaan, dengan sistem politik yang sama. Selama masa Presiden Soekarno, model sistem demokrasi berubah dua kali: dari demokrasi parlementer (liberal) menjadi demokrasi terpimpin. Gagalnya demokrasi parlementer disebabkan oleh keyakinan Presiden Soekarno bahwa model ini tidak efektif dalam politik global saat ini. Pada akhir tahun 1950-an, Soekarno mencoba demokrasi terpimpin, bentuk demokrasi baru. Jika demokrasi diterapkan secara terpimpin, itu tidak hanya tidak demokratis tetapi juga mengarah pada kediktatoran. Dalam sejarah perkembangan Indonesia yang berbeda, demokrasi seringkali mengalami masa transisi yang dimulai pada awal kemerdekaan. Hal ini disebabkan oleh pergolakan politik yang terjadi pada saat itu, Suparyanto (2018:26).

Namun, setelah Orde Lama berakhir pada tahun 1965, Orde Baru muncul, yang secara drastis mengubah demokrasi menjadi negara yang otoriter dan feodalistik. Dalam hal ini, demokrasi kehilangan maknanya. Di bawah pemerintahan otoriter Soeharto, keinginan orang tidak didengarkan. Tidak ada ruang atau kebebasan yang diberikan kepada suara kritis masyarakat. Seperti yang diketahui, selama pemerintahan Orde Baru, demokrasi warga sangat terbatas karena kontrol negara yang kuat, yang mengakibatkan perampasan hak politik warga negara. Ini menunjukkan bahwa selama Orde Baru, demokrasi sebenarnya tidak relevan atau tidak lagi relevan, Suparyanto (2018:32).

Sejak tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan politik signifikan. Ini ditandai dengan munculnya gerakan reformasi dan berakhirnya sistem otoriter Orde Baru pemerintahan Soeharto. Kaum muda Indonesia tidak puas dan kecewa dengan pemerintahan Orde Baru. Oleh karena itu, dengan pengunduran diri Soeharto dari kursi kekuasaan, sistem Orde Baru pada akhirnya runtuh. Indonesia mengadopsi sistem pemilihan secara langsung untuk pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2004. Ini meningkatkan citra demokrasi Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki banyak pemerintahan yang berbeda selama pemerintahan Soeharto, demokrasinya masih belum sepenuhnya merdeka. Singkatnya, demokrasi yang ideal masih jauh dari harapan rakyat Indonesia dan bahkan hampir tidak ada dalam perpolitikan. Hal ini disebabkan oleh banyak hal yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah praktik politik dinasti yang semakin berkembang di perpolitikan Indonesia, secara bertahap merusak demokrasi negara, Suparyanto (2018:33).

Dinasti politik adalah bentuk kekuasaan keluarga politik yang bertanggung jawab atas pemerintahan nasional dan lokal. Pada konteks tradisional, arti dinasti adalah penguasa meletakkan keluarga, saudara kandung, dan anggota keluarganya pada jabatan yang sangat strategis dengan tujuan membangun dinasti kerajaan politik di dalam pemerintahan. Dinasti politik dibuat untuk memastikan bahwa anggota keluarga politik memiliki kontrol atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adanya keluarga politik di jabatan strategis akan memudahkan pengusaha untuk mengontrol dan mengontrol ritme politik di tingkat penyelenggaraan pemerintahan, Syiah (2021:50).

Praktik politik dinasti di Indonesia menjadi ancaman yang sangat menakutkan bagi masa

depan generasi muda negara dan negara. Politik dinasti di Indonesia bukanlah hal baru, tetapi sudah lama ada. Kehadiran Siti Hardiyanti Rukmana, putri Soeharto, yang telah menjabat sebagai presiden selama bertahun-tahun, menunjukkan praktik politik dinasti mulai berkembang ketika era Orde Baru dimulai. Dari tahun 1992 hingga 1998, Siti Hardiyanti Rukmana, juga dikenal sebagai Tutut, adalah anggota MPR RI dari Fraksi Golkar. Setelah itu, ayahnya sendiri, Soeharto, menunjuknya sebagai Menteri Sosial ke-23. Namun, dia hanya menjabat selama beberapa bulan karena kurangnya reformasi di masyarakat Indonesia. Menariknya, ketika Orde Baru runtuh, praktik politik dinasti malah meningkat dengan cepat, seperti yang terlihat dalam politik Indonesia saat ini, (Parera, 2023:4).

Di samping mempertahankan kekuasaan dan praktik korupsi, politik dinasti menempatkan sistem demokrasi Indonesia dalam bahaya besar. Ini terutama berlaku untuk pelaksanaan pemilihan umum. Salah satu cara utama untuk mempertahankan sistem politik demokratis adalah pemilihan umum. Ini berarti bahwa keputusan bersama adalah hasil dari proses demokrasi yang melibatkan semua warga negara untuk berpartisipasi dalam ranah sosio-politik dengan dasar ketidakpihak. Oleh karena itu, salah satu karakteristik negara dan masyarakat demokratis adalah pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Ini menunjukkan bahwa orang memiliki kebebasan untuk membentuk organisasi, perkumpulan yang dianggap penting untuk mengisi dan mengembangkan kehidupan mereka baik sebagai kelompok maupun individu dalam masyarakat. Hal ini juga terkait dengan kebebasan masyarakat untuk menyatakan pendapat dan pendapat mereka. Fitzpatrick (2009:50), dinasti politik dari sudut pandang persamaan (*equality*), bahwa keluarga politik telah menutup kesempatan bagi warga Negara untuk berpartisipasi dalam politik.

Di balik kenyataan ini, ada kenyataan bahwa warga negara menghadapi berbagai tantangan ketika mereka ingin berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Ini sangat berbeda dari demokrasi yang sebenarnya, di mana rakyat harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Dengan kata lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dalam kontestasi untuk jabatan di tingkat regional dan nasional. Selain itu, kehadiran politik dinasti menimbulkan kekhawatiran tentang ketidaksetaraan dalam pembagian

kekuasaan politik, yang dapat mencerminkan kekurangan representasi politik demokratis, yang dikenal sebagai "kekuatan melahirkan kekuatan". Kehadiran politik dinasti yang melingkupi perselisihan dari tingkat regional hingga nasional membuat substansi demokrasi sulit diwujudkan dalam kehidupan perpolitikan Indonesia, dan hal ini berdampak pada kemajuan demokrasi. Kesuburan politik dinasti tentu tidak terlepas dari peran partai politik dan undang-undang pilkada, sehingga kualitas demokrasi semakin suram dan terancam hilang. Selain itu, pengawasan dan pembatasan praktik politik dinasti hanya didasarkan pada nilai-nilai moral tentang kepatutan dan kepatutan. Karena tidak ada pengawasan yang ketat, politik dinasti terus berkembang dan mengegerogoti kehidupan politik Indonesia, memengaruhi sistem demokrasi, Hadiz (2005:113).

Praktik politik dinasti terlihat dalam pemilihan umum, di mana hubungan yang dibangun para elit politik dengan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, lebih penting daripada kualitas. Dengan kata lain, praktik politik dinasti Indonesia dapat menghalangi kemunculan pemimpin yang berkualitas dan menghasilkan pemimpin yang abal-abalan karena jaringan hubungan. Ironisnya, banyak dari mereka terlalu fokus pada materi, bahkan korupsi, dan mengabaikan tujuan utama, yaitu menciptakan bonum commune. Pada saat ini, eksistensi politik dinasti di Indonesia digunakan untuk mempertahankan status atau kekuasaan dengan mewariskan kekuasaan kepada orang lain yang memiliki hubungan dekat, seperti keluarga. Pada dasarnya, ada banyak pro dan kontra terhadap politik dinasti; ada yang menganggapnya baik karena menjaga kesetabilan politik, dan ada juga yang menganggapnya sebagai alat yang digunakan para pejabat untuk mempertahankan kekuasaan mereka, dan mempersulit orang lain untuk berpartisipasi dalam lembaga perpolitikan karena calon pemimpin politik dinasti biasanya menerima lebih banyak dukungan. Ada pro dan kontra dalam politik dinasti, serta pengertian positif dan negatif. Baik efek positif maupun negatif dari politik dinasti tergantung pada proses dan hasil dari jabatan yang dipegang oleh jaringan politik dinasti. Pertama, politik dinasti dianggap positif jika proses pemilihannya murni demokratis dan kepemimpinannya membantu pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, politik dinasti memiliki makna negatif karena dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat, sistem hukum, penegakan hukum, dan pelembagaan politik yang

relevan. Misalnya, jika politik dinasti terjadi di masyarakat dengan tingkat pendidikan politik yang rendah, sistem hukum dan penegakan hukum yang lemah, dan pelembagaan politik yang tidak stabil, maka politik tersebut dapat memiliki makna negatif, (Parera, 2023:6).

Berdasarkan pengamatan awal peneliti terkait politik dinasti di Indonesia peneliti mendapatkan informasi dari salah seorang mahasiswa Universitas Nias bahwa pada saat ini praktik politik dinasti memberikan dampak buruk secara signifikan terhadap akuntabilitas pada birokrasi karena terdapat kecenderungan potensi terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dinasti politik seperti demikianlah yang nantinya akan memberikan potensi tatanan politik yang buruk di tengah konsistensi reformasi birokrasi dan jika kekuasaan itu dibangun atas adanya ikatan keluarga, maka akan menciptakan kesenjangan ketika faktor keluarga akan bersifat mencampuri urusan yang bersifat umum. Maka, hal tersebut tidak lain akan menjadikan situasi dimana kepentingan keluarga atau golongan akan menjadi prioritas dalam sebuah dinasti politik. Dengan demikian dalam perpolitikan yang baik maka tidak perlu melakukan dinasti politik untuk membawa Indonesia ke arah yang berkembang, oleh karena itu peneliti menarik judul penelitian ialah "Fenomena Politik Dinasti sebagai Tantangan bagi Sistem Demokrasi di Indonesia dalam Perspektif Mahasiswa Universitas Nias".

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan peristiwa berdasarkan observasi ilmiah. Jenis penelitian bersifat interaktif dan partisipatoris, mengumpulkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek yang diamati. Variabel penelitian mencakup pengalaman dan sikap mahasiswa terhadap dinasti politik di Indonesia. Lokasi penelitian berada di Universitas Nias, dengan subjek mahasiswa dari berbagai program studi. Instrumen penelitian adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara terstruktur digunakan untuk mengumpulkan data dari mahasiswa, sementara dokumen dan observasi juga dianalisis. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif Miles dan Huberman, mencakup pengumpulan, reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Penelitian dilakukan pada semester genap 2023/2024.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Politik dinasti dalam perspektif mahasiswa Universitas Nias

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Universitas Nias bahwa politik dinasti adalah politik yang mengatasnamakan sistem kekeluargaan atau kepentingan pemimpin. Sebagaimana di ungkap oleh Gano Perhatikan Zebua (mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) yang mengatakan bahwa:

Sepengalaman saya politik dinasti itu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan. Kalau berbicara politik dinasti dalam perspektif mahasiswa itu menurut saya politik dinasti itu politik yang menggunakan sistem kekeluargaan demi kepentingan sorang pemimpin terhadap anggotanya dengan memanfaatkan kekuasaan atau pun jabatan yang sedang dijalankannya karna ada suatu kepentingan baik itu kepentingan untuk keluarga, untuk pekerjaan ataupun yang lainnya, yang dalam suatu kelompok tersebut mereka menggunakan politik dinasti itu demi memanfaatkan dari pada kekuasaan. (wawancara, Kamis 13 Juni 2024).

Hal senada juga di ungkap oleh Fanida Gulo (mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan), bahwa:

Sejauh pengamatan saya persoalan politik dinasti itu sangat melanggar suatu peraturan dimana peraturan yang sudah di tetapkan seolah-olah tidak mengikuti aturan atau sama artinya tidak mempedulikan, demi mencapai tujuan dalam memegang suatu kekuasaan. Sedangkan dari sudut pandangan saya sebagai mahasiswa bahwa politik dinasti itu politik yang sangat bertentangan sekali dari pada satu aturan dengan tidak memberikan kesempatan kepada orang lain dalam hal memimpin suatu lembaga tetapi lebih memilih keluarga atau orang terdekatnya yang menjadi pemimpin atau penguasa. (wawancara, Jum'at 14 Juni 2024).

Politik dinasti dapat mengancam prinsip demokrasi ketika kekuasaan atau pengaruh politik terkonsentrasi di tangan keluarga atau sekelompok kecil orang, ada risiko oligarki atau monopoli kekuasaan politik yang dapat menghambat partisipasi politik masyarakat secara keseluruhan. Sebagaimana diungkap oleh Calvin Armen Lahagu (mahasiswa

Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen), yang menyatakan bahwa:

Menurut saya politik dinasti itu bisa dikatakan suatu sikap yang melawan atau melanggar suatu aturan yang berlaku sehingga dapat menimbulkan suatu tantangan atau suatu masalah. Sedangkan dalam perspektif saya, tentang politik dinasti itu tindakan yang dilakukan seorang pemimpin dengan mewariskan suatu jabatan terhadap keluarganya sendiri, tidak memberikan kesempatan terhadap orang lain yang lebih berkompentensi, karna misalnya seorang pemimpin memilih anaknya sebagai pengganti dari jabatannya tersebut belum tentu punya kemampuan dalam memimpin suatu organisasi. (wawancara, Sabtu 22 Juni 2024).

Hal senada diungkapkan respon Elman Priadi Gulo (mahasiswa Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen), bahwa:

Menurut saya Politik dinasti itu merujuk pada praktik di mana kekuasaan atau pengaruh politik diwariskan di dalam satu keluarga atau dinasti. (wawancara, Sabtu 22 Juni 2024).

Hal serupa diungkapkan oleh informan Osakdiman Zega (mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknologi Informasi), bahwa:

Menurut pandangan saya Politik dinasti merupakan serangkaian strategi yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai kekuasaan, agar kekuasaan tetap menjadi milik mereka dengan cara mengalihkan kekuasaan yang telah mereka pegang kepada orang lain yang berkaitan dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. (wawancara, Sabtu 29 Juni 2024).

Dari beberapa pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Politik dinasti merujuk pada praktik di mana kekuasaan atau pengaruh politik dalam suatu keluarga tertentu diwariskan atau dipertahankan dari generasi ke generasi. Dalam pandangan mahasiswa atau kalangan akademik, politik dinasti sering kali dianggap sebagai fenomena yang memiliki beberapa dampak negatif dan kontroversial dalam sistem politik sebuah negara.

2. Mengapa politik dinasti tidak sesuai dengan alam demokrasi dalam perspektif mahasiswa Universitas Nias

Dalam konteks demokrasi, banyak yang mengkritik praktik ini karena dinasti dapat

mengarah pada konsentrasi kekuasaan yang tidak sehat dan kurang mendukung prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya mendorong rotasi kekuasaan dan partisipasi masyarakat yang lebih luas. Sebagaimana diungkapkan oleh Gano Perhatikan Zebua (mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) yang menyatakan bahwa:

Dalam pandangan saya sebagai mahasiswa, bahwa politik dinasti tidak sesuai dengan alam demokrasi saat ini karena dalam politik dinasti itu sudah melanggar alam demokrasi atau suatu bentuk perjalanan demokrasi karena dalam suatu kepentingan politik dinasti itu berpihak pada kepentingan suatu pihak saja artinya dalam melaksanakan kepemimpinannya itu berpihak kepada kepentingan yang adanya pengaruh atau kepentingan dari yang mempengaruhi. (wawancara, Kamis 13 Juni 2024).

Hal senada diungkapkan oleh Fanida Gulo (mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan), bahwa:

Dalam pandangan saya jelas bahwa politik dinasti itu sangat tidak sesuai dengan alam demokrasi dikarenakan kalau kita lihat demokrasi saat ini sangat memprihatikan sekali dimana azas hukum yang telah di buat dan peraturan yang telah di atur berupaya mengubah dengan dengan tujuan kepentingan keluarga atau kelompok demi mencapai target dalam mewariskan jabatan terhadap keluarga seorang pemimpin. (wawancara, Jum'at 14 Juni 2024).

Demokrasi yang baik memiliki beberapa karakteristik penting yang berkontribusi pada keberhasilannya dalam mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Salah satunya adalah partisipasi yang aktif, masyarakat memiliki kesempatan dan motivasi untuk terlibat secara aktif dalam proses politik, termasuk pemilihan umum, debat kebijakan, dan partisipasi dalam organisasi masyarakat sipil. Sebagaimana diungkapkan oleh Calvin Armen Lahagu (mahasiswa Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen), bahwa:

Menurut pandangan saya bahwa politik tidak sesuai dengan alam demokrasi itu karena politik dinasti itu hanya menciptakan dimana kekuasaan yang dijalani seorang pemimpin itu hanya kelompok keluarga saja, sehingga tidak menghiraukan dari pada kepentingan orang lain atau umum. Sehingga

dengan cara tersebut hanya mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan serta mengurangi kesempatan bagi individu-individu dari latar belakang yang berbeda untuk berpartisipasi dan mewakili masyarakat secara merata. (wawancara, Sabtu 22 Juni 2024).

Hal senada juga diungkapkan Elman Priadi Gulo (mahasiswa Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen), bahwa:

Karena saya sebagai mahasiswa maka saya berpendapat tentang politik dinasti itu tidak sesuai dengan alam demokrasi dikarenakan kalau kita lihat politik dinasti itu hanya menutup kesempatan terhadap orang lain sehingga tidak tercermin nilai-nilai demokrasi yang sebenarnya, karena di hambat oleh kepentingan keluarga seorang pemimpin atau kelompok. (wawancara, Sabtu 22 Juni 2024).

Hal serupa diungkapkan oleh informan Osakdiman Zega (mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknologi Informasi), bahwa:

Menurut pandangan saya tentang politik dinasti tidak sesuai dengan alam demokrasi disebabkan karena politik dinasti ini cenderung hanya memprioritaskan kepentingan-kepentingan keluarga atau kepentingan kerabat tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau keadilan masyarakat secara keseluruhan. (wawancara, Sabtu 29 Juni 2024).

Dari beberapa hasil wawancara informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa politik tidak sesuai dengan alam demokrasi, pertama karena Ketergantungan pada keluarga dari pada kompetensi, dalam sistem politik dinasti kepemimpinan atau posisi politik cenderung ditentukan oleh hubungan darah bukan berdasarkan kualifikasi atau kompetensi individu. Hal ini dapat menyebabkan terpilihnya pemimpin yang kurang berkualitas atau tidak kompeten, karena hanya memanfaatkan popularitas atau keturunan. Kedua ketidakadilan dan kesenjangan sosial, politik dinasti sering kali memperkuat ketimpangan sosial karena memberikan kekuasaan atau kesempatan yang berkelanjutan kepada segelintir keluarga atau kelompok, yang mungkin memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dan kekuatan politik. Hal ini dapat memperburuk kesenjangan antara kelompok yang berkuasa dan rakyat umum.

B. Pembahasan

1. Politik dinasti dalam perspektif mahasiswa Universitas Nias

Politik dinasti adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang telah di buat dan ditetapkan untuk mengatur perilaku, tindakan dan proses dalam suatu sistem atau masyarakat. Tujuannya untuk menciptakan keteraturan dan memastikan keadilan. Politik dinasti bisa dikatakan politik yang menggunakan sistem kekeluargaan demi kepentingan seorang pemimpin dengan memanfaatkan kekuasaan yang sedang di pegang oleh seseorang lalu menobatkan seseorang yang berasal dari keluarganya itu sendiri untuk menjadi penerus kekuasaan dari jabatan yang sedang di jalani dari keluarga tersebut. Politik dinasti dapat juga terjadi dengan memberi pekerjaan lain atau kedudukan terhadap orang terdekatnya yang dalam suatu sistem tersebut mereka mempunyai hubungan dekat.

Sikap dari suatu politik dinasti sangat memperlihatkan bahwa tindakan tersebut adanya ketidak pedulian terhadap peraturan yang telah di buat bahwa politik dinasti melanggar peraturan yang ada. Peraturan ini bisa berupa hukum, regulasi, atau norma yang dirancang untuk memastikan keberagaman dalam politik, mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan, dan mempromosikan keadilan serta transparansi dalam proses politik. Praktik politik dinasti seolah-olah tidak mengikuti aturan artinya, meskipun ada peraturan yang ditetapkan untuk mencegah dominasi kekuasaan oleh satu keluarga atau kelompok, praktik dinasti seringkali melanggar atau mengabaikan peraturan tersebut. politik dinasti dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu mempertahankan atau memperluas kekuasaan.

Dalam konteks ini, biasanya mencerminkan kepedulian terhadap prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan pemerintahan yang baik. Sering kali menilai sistem politik berdasarkan sejauh mana sistem tersebut mendukung kesempatan yang sama bagi semua orang dan mencegah konsentrasi kekuasaan yang tidak sehat. Politik dinasti merujuk pada praktik di mana kekuasaan politik terkonsentrasi dalam satu keluarga atau kelompok keluarga yang sama. Dalam sistem ini, kekuasaan cenderung diwariskan atau dipindahkan dari satu anggota keluarga ke anggota keluarga lainnya. politik dinasti dianggap sangat bertentangan dengan aturan

atau prinsip yang mendasari sistem pemerintahan yang adil dan merata. Aturan-aturan ini sering kali termasuk prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kesempatan yang sama.

Politik dinasti bisa dianggap melanggar prinsip-prinsip ini karena: pertama, Politik dinasti sering kali membatasi kesempatan bagi orang lain untuk memimpin atau mengambil peran penting dalam pemerintahan atau lembaga. Dengan memilih hanya anggota keluarga atau orang terdekat sebagai pemimpin, kesempatan untuk individu lain yang mungkin memiliki kualifikasi dan visi yang berbeda menjadi terbatas. Kedua, Praktik ini mengutamakan kepentingan keluarga atau kelompok tertentu, bukannya memilih pemimpin berdasarkan kemampuan individu. Hal ini bisa menyebabkan kekuasaan yang tidak sehat dan kurangnya inovasi serta perspektif baru dalam pemerintahan. Dalam politik dinasti, pemilihan pemimpin sering kali didasarkan pada hubungan keluarga atau kedekatan pribadi, bukan pada kompetensi atau pilihan publik yang objektif. Ini bisa mengakibatkan pemimpin yang kurang berkualitas atau kurang responsif terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Politik dinasti merujuk pada sistem di mana kekuasaan politik atau jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan diwariskan dari satu anggota keluarga ke anggota keluarga lainnya. Dalam sistem semacam ini, kekuasaan sering kali tetap berada dalam satu keluarga atau kelompok. Politik dinasti sering kali mendapatkan posisi dan kekuasaan bukan karena prestasi atau kemampuan mereka, tetapi karena hubungan keluarga. Ini bisa menghambat kesempatan bagi individu yang mungkin lebih kompeten tetapi tidak memiliki latar belakang keluarga yang sama. Pada sistem politik yang ideal, posisi dan kekuasaan harus diperoleh berdasarkan kompetensi dan kontribusi, bukan keturunan. Politik dinasti bisa dianggap melawan prinsip meritokrasi ini, di mana seleksi pejabat publik seharusnya didasarkan pada kemampuan dan bukan pada hubungan keluarga. Kepentingan Pribadi dengan kepentingan Publik ketika kekuasaan terpusat dalam satu keluarga, ada risiko bahwa kebijakan dan keputusan akan lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau keluarga ketimbang kepentingan publik yang lebih luas. Ini bisa menimbulkan masalah dalam hal transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Masalah keterbatasan inovasi,

Jika kekuasaan terus-menerus berada dalam satu dinasti, bisa jadi ada kurangnya inovasi dan ide baru dalam pemerintahan, karena seringkali dinasti politik lebih fokus pada mempertahankan kekuasaan dari pada melakukan reformasi atau perubahan yang mungkin diperlukan.

Politik dinasti merujuk pada praktik di mana seorang pemimpin atau penguasa mewariskan jabatan atau kekuasaan kepada anggota keluarganya sendiri, biasanya tanpa memperhatikan apakah orang tersebut memiliki kemampuan atau kompetensi yang memadai. Ini berarti bahwa jabatan yang seharusnya dipilih berdasarkan kemampuan sering kali jatuh ke tangan keluarga, seperti anak, saudara, atau kerabat dekat dari pemimpin yang sedang menjabat. Masalah utama dari politik dinasti adalah Mengabaikan Kompetensi dengan mewariskan jabatan kepada anggota keluarga, tidak ada jaminan bahwa orang yang menggantikan posisi tersebut memiliki kemampuan, keterampilan, atau pengalaman yang diperlukan untuk memimpin dengan efektif. Misalnya, seorang pemimpin mungkin memilih anaknya sebagai pengganti, meskipun anak tersebut mungkin tidak memiliki latar belakang atau kemampuan yang sesuai untuk memimpin organisasi dengan baik. Kemudian kurangnya kesempatan untuk individu lain artinya politik dinasti sering kali menutup kesempatan bagi individu yang lebih berkompeten tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemimpin yang sedang menjabat. Hal ini bisa membatasi potensi inovasi dan kemajuan, karena orang-orang yang mungkin lebih berbakat atau memiliki ide baru tidak diberikan kesempatan untuk memegang posisi kekuasaan.

Ketika kekuasaan dan jabatan diwariskan dalam satu keluarga, ada risiko bahwa keputusan yang diambil mungkin lebih memprioritaskan kepentingan keluarga dari pada kepentingan publik, ini dapat mengakibatkan kebijakan yang kurang efektif atau bahkan merugikan masyarakat luas. Politik dinasti adalah praktik di mana kekuasaan politik dipertahankan dalam satu keluarga atau kelompok yang sama dari generasi ke generasi. Strategi ini sering kali melibatkan proses di mana kekuasaan yang ada dipindahkan atau diwariskan kepada anggota keluarga atau orang-orang dekat dari pemegang kekuasaan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kekuasaan

tetap berada di tangan kelompok yang sama dan tidak berpindah ke tangan pesaing luar.

2. Mengapa politik dinasti tidak sesuai dengan alam demokrasi dalam perspektif mahasiswa Universitas Nias

Politik dinasti mengacu pada praktek di mana kekuasaan politik atau jabatan publik dipegang oleh anggota keluarga yang sama secara turun-temurun. Dalam konteks demokrasi, politik dinasti sering dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang ideal. Demokrasi menekankan pentingnya kesetaraan yaitu bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan maju berdasarkan kemampuan mereka. Dalam politik dinasti, jabatan politik sering kali diwariskan berdasarkan hubungan keluarga, bukan berdasarkan prestasi atau kemampuan. Ini bisa mengabaikan prinsip bahwa posisi publik harus diperoleh melalui kompetisi terbuka dan adil.

Politik dinasti dapat mengakibatkan konsentrasi kekuasaan dalam satu keluarga atau kelompok kecil. Ini berpotensi mengurangi representasi dan keragaman dalam pemerintahan. Kekuasaan yang terkonsentrasi bisa mengarah pada pengabaian kepentingan masyarakat luas demi kepentingan keluarga atau kelompok tertentu. Politisi yang berasal dari dinasti mungkin lebih cenderung mengutamakan kepentingan keluarga atau kelompoknya sendiri dari pada kepentingan masyarakat secara umum. Hal ini dapat mengarah pada nepotisme, di mana keputusan-keputusan politik dan kebijakan dibuat untuk keuntungan kelompok tertentu alih-alih untuk kebaikan umum.

Politik dinasti dinilai sangat tidak sesuai dengan alam demokrasi saat ini karena beberapa alasan terkait pelaksanaan hukum dan peraturan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam demokrasi yang sehat, hukum dan peraturan dibuat untuk melindungi kepentingan publik dan memastikan pemerintahan yang adil. Namun, politik dinasti dapat menyebabkan peraturan dan hukum dimanipulasi atau diubah untuk kepentingan keluarga atau kelompok tertentu. Hal ini bisa terjadi ketika pejabat yang berasal dari dinasti berusaha membuat kebijakan yang memungkinkan mereka atau keluarga mereka untuk tetap berkuasa. Tindakan semacam ini bertentangan dengan prinsip

keadilan dan merusak integritas sistem hukum.

Politik dinasti sering melibatkan pemimpin yang menggunakan kekuasaan mereka untuk memperkuat posisi keluarga atau kelompok mereka, alih-alih melayani kepentingan masyarakat secara umum. Ini bisa mengakibatkan pembuatan kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu dan bukan kepentingan publik. Dalam demokrasi, pejabat publik diharapkan membuat keputusan yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan untuk keuntungan pribadi atau keluarga. Salah satu ciri khas politik dinasti adalah adanya upaya untuk mewariskan jabatan atau kekuasaan kepada anggota keluarga.

Dalam sistem demokrasi yang baik, jabatan publik harus diperoleh melalui proses yang adil dan transparan. Politik dinasti di sisi lain menciptakan situasi di mana kekuasaan diwariskan berdasarkan hubungan keluarga, bukan berdasarkan kemampuan, kualifikasi, atau dukungan rakyat. Ketika politik dinasti mendominasi ini dapat mengurangi partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Masyarakat mungkin merasa bahwa peluang untuk terlibat atau mempengaruhi kebijakan terbatas jika kekuasaan selalu berada dalam lingkaran keluarga yang sama. Demokrasi yang sehat memerlukan partisipasi yang luas dari berbagai lapisan masyarakat agar keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan umum, bukan hanya kelompok tertentu.

Politik dinasti sering kali menyebabkan kekuasaan terpusat pada satu keluarga atau kelompok kecil. Ketika posisi kekuasaan diwariskan di dalam keluarga keputusan dan kebijakan cenderung hanya mempertimbangkan kepentingan anggota keluarga tersebut. Ini dapat mengabaikan kepentingan masyarakat luas, yang seharusnya menjadi prioritas dalam sistem demokrasi. Dalam demokrasi, kekuasaan harus diperoleh dan dijalankan dengan mempertimbangkan kepentingan publik secara keseluruhan, bukan hanya kelompok keluarga atau individu tertentu. Kekuasaan yang terpusat dalam keluarga atau kelompok tertentu dapat membuka peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan.

Ketika seorang pemimpin dari dinasti menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan keluarga, ini dapat mengarah pada keputusan yang tidak adil. Dalam sistem

demokrasi yang baik, kekuasaan harus diawasi dan dipertanggungjawabkan untuk mencegah penyalahgunaan serta memastikan bahwa keputusan yang diambil menguntungkan masyarakat secara luas. Politik dinasti dapat mengurangi kesempatan bagi individu dari latar belakang yang berbeda untuk berpartisipasi dalam proses politik. Ketika posisi politik selalu diwariskan di dalam satu keluarga atau kelompok, individu lain yang mungkin memiliki potensi yang baik bisa kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dan mewakili masyarakat.

Demokrasi yang sehat harus menyediakan peluang yang sama bagi semua individu untuk terlibat dalam politik, tanpa memandang latar belakang keluarga atau status sosial. Dalam sistem politik dinasti, representasi dalam pemerintahan cenderung tidak merata. Jika kekuasaan dikendalikan oleh satu keluarga, maka suara dan kepentingan kelompok lain mungkin diabaikan. Demokrasi idealnya memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki perwakilan yang adil dan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi berbagai kelompok, bukan hanya kepentingan keluarga yang berkuasa.

Politik dinasti sering kali melibatkan pewarisan kekuasaan dalam satu keluarga atau kelompok tertentu. Hal ini secara langsung membatasi kesempatan bagi individu lain dari latar belakang yang berbeda untuk berpartisipasi dalam politik. Dalam sistem demokrasi yang ideal, setiap individu seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dan memperoleh jabatan publik berdasarkan kemampuan dan kualifikasi mereka, bukan berdasarkan hubungan keluarga atau status sosial.

Ketika kekuasaan terkonsentrasi dalam satu keluarga atau kelompok ada risiko bahwa suara dan kepentingan kelompok lain diabaikan. Demokrasi memerlukan representasi yang adil dan merata dari berbagai lapisan masyarakat. Dengan adanya politik dinasti, kebijakan dan keputusan yang diambil mungkin lebih mencerminkan kepentingan keluarga atau kelompok tertentu, bukan kepentingan publik secara keseluruhan. Ini mengurangi keanekaragaman perspektif dan kepentingan dalam pemerintahan. Politik dinasti dapat menghambat nilai-nilai dasar demokrasi, seperti kesetaraan kesempatan, akuntabilitas, dan transparansi. Demokrasi menekankan pentingnya sistem yang adil dan

terbuka di mana semua individu memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik. Ketika kekuasaan diwariskan dalam satu keluarga, prinsip-prinsip ini dapat terabaikan karena keputusan politik cenderung lebih fokus pada kepentingan keluarga yang berkuasa daripada kebutuhan dan aspirasi masyarakat umum.

Politik dinasti sering kali melibatkan pewarisan kekuasaan di dalam satu keluarga atau kelompok kecil. Dalam sistem ini, keputusan politik dan kebijakan cenderung mengutamakan kepentingan keluarga atau kerabat dari pemimpin yang berkuasa. Prioritas ini dapat mengarah pada keputusan yang lebih bermanfaat untuk keluarga atau kelompok tersebut dari pada untuk masyarakat secara umum. Ketika kekuasaan dikuasai oleh dinasti politik, sering kali terdapat pengabaian terhadap kebutuhan dan keadilan masyarakat luas. Keputusan yang diambil mungkin lebih berorientasi pada keuntungan pribadi keluarga atau kelompok yang berkuasa, bukan pada kesejahteraan umum.

Dalam sistem demokrasi yang ideal, kebijakan dan keputusan seharusnya mempertimbangkan dan memenuhi kebutuhan serta aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Demokrasi menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam pemerintahan. Politik dinasti bisa menyebabkan ketidakadilan dengan menghalangi individu dari latar belakang yang berbeda untuk mendapatkan kesempatan berpartisipasi dalam proses politik. Ini berpotensi menciptakan ketimpangan di mana kekuasaan tetap terpusat pada keluarga atau kelompok tertentu, mengabaikan prinsip keadilan yang seharusnya menjamin kesempatan yang sama bagi semua orang. Dalam sistem politik dinasti, keterwakilan dan diversitas dalam pemerintahan bisa berkurang. Ketika posisi politik dipegang oleh anggota keluarga atau kerabat yang sama, ada risiko bahwa suara dan kepentingan kelompok lain mungkin tidak mendapat perhatian yang layak. Demokrasi membutuhkan representasi yang luas dari berbagai segmen masyarakat untuk memastikan bahwa berbagai perspektif dan kepentingan dapat diakomodasi dengan baik.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dilapangan, maka dapat peneliti kemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Politik dinasti dalam perspektif mahasiswa merupakan politik yang mengatasnamakan sistem kekeluargaan atau kepentingan pemimpin terhadap bawahan dan pemanfaatan kekuasaan jabatan yang di pegang oleh pemimpin terhadap bawahan tersebut karena ada kepentingan baik itu dari kekeluargaan atau kepentingan pekerjaan dan sebagainya, yang dalam satu kubu yang notabenenya adalah mereka satu view dan ketika mereka menggunakan politik dinasti itu mereka memanfaatkan kekuasaan tersebut untuk mempengaruhi seseorang. Politik dinasti itu merujuk pada praktik di mana kekuasaan atau pengaruh politik diwariskan di dalam satu keluarga atau dinasti. Politik dinasti dikatakan suatu sikap yang melawan atau melanggar suatu aturan yang berlaku sehingga dapat menimbulkan suatu tantangan atau suatu masalah. Politik dinasti merupakan tindakan yang dilakukan sorang pemimipin dengan mewariskan suatu jabatan terhadap keluarganya sendiri, tidak memberikan kesempatan terhadap orang lain yang lebih berkompetensi, karna misalnya seorang pemimpin memilih anaknya sebagai pengganti dari jabatannya tersebut belum tentu punya kemampuan dalam memimpin suatu organisasi.
2. Politik dinasti tidak sesuai dengan alam demokrasi dalam perspektif mahasiswa Universitas Nias karena salah satu prinsip utama dalam demokrasi adalah keterwakilan yang adil dari kepentingan masyarakat yang beragam. Politik dinasti cenderung menciptakan kelompok kecil di mana kekuasaan dan pengaruh politik terkonsentrasi di tangan sedikit keluarga atau individu. Hal ini dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan, serta mengurangi kesempatan bagi individu-individu dari latar belakang yang berbeda untuk berpartisipasi dan mewakili masyarakat secara merata. Dalam sistem demokratis ideal, akses terbuka terhadap jabatan-jabatan publik harus diperjuangkan berdasarkan kualifikasi dan dedikasi, bukan hubungan keluarga. Politik dinasti cenderung hanya memrioritaskan kepentingan-kepentingan keluarga atau

kepentingan kerabat tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau keadilan masyarakat secara keseluruhan.

B. Saran

Masyarakat memiliki peran dalam meningkatkan kualitas arah kemajuan dan perkembangan demokrasi sebagai negara demokrasi. Kesuksesan sistem demokrasi dianggap bergantung pada masyarakat. Dengan kata lain, meningkatkan demokrasi merupakan tanggung jawab semua masyarakat, bukan hanya pemerintah. Hak politik rakyat termasuk hak untuk memilih dan dipilih. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya orang ikut serta dalam pembangunan negara demokratis. Menghidupkan nilai-nilai demokrasi dalam setiap individu dan lembaga pemerintahan adalah salah satu cara masyarakat bertindak. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi dapat diberikan di bawah ini.

1. Masyarakat

Masyarakat harus dididik tentang demokrasi dan memahami dunia politik dengan cara mengikuti berita politik dari berbagai sumber terpercaya seperti surat kabar, situs berita, media elektronik yang membantu masyarakat memahami perkembangan terkini dan isu-isu politik. Selain itu juga masyarakat harus mampu memahami arah dari pada politik dengan cara bergabung dalam forum dan diskusi misalnya ikut serta dalam diskusi politik, seminar, atau forum yang sering dilaksanakan komunitas sehingga diskusi tersebut dapat memberikan wawasan yang mendalam dan pandangan yang berbeda dengan tujuan yang positif.

2. Pemerintah

Pemerintah sebagai badan yang memiliki kewenangan dalam mengatur, memimpin dan mengelola negara atau wilayah supaya memperkuat pengawasan terhadap prakti-praktik yang bertantangan dengan azas demokrasi, menegakkan hukum yang berlaku secara adil dan juga konsisten. Meningkatkan pendidikan politik terhadap masyarakat agar lebih memahami dampak negatif dari politik dinasti dan memilih pemimpin berdasarkan kinerja dan kemampuan yang dimiliki.

DAFTAR RUJUKAN

- Jati, Wasisto, Raharjo. (2020) *Dinasti Politik di Aras Lokal*. Makasar: Zaldi Rusnaidy S.
- Lofland. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosadakarya
- Maizuar. (2016). *fenomena kompleks yang harus dilihat secara komprehensif* Jakarta: Rineka Cipta. Indonesia. Bandung: PT.Reflika Aditama Jana, T Anggadireja, dkk.
- Press Syiah Kuala University. (2021). *Demokrasi dan Otonomi Daerah Dinasti Politik dan Demokrasi Lokal*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Sudjana dan Ibrahim. (2017). *Design Research As A Means For Building A Knowledge Base For Teaching In Mathematics Education*. The ElementarySchool Journal, 5.
- Sugiyono. (2016). *Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Multi Pressindo.
- Sukmadinata dan Sutopo. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sukmadinata dan Sutopo. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Suparyanto, Yudi. (2018). *Demokrasi di Indonesia*. Klaten: Campaka Putih.
- Sutopo. (2016). *Manajemen Administrasi Perkantoran*. Bandung : CV. Rawa Bada.